



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUAHASIL NAZARA**
2. Jabatan : **WAKIL MENTERI**
3. NHK : **180291**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 41.895.811.000**

1. Tanah Seluas 532 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,  
HASIL SENDIRI Rp. 3.704.316.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 547 m2/374 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.370.415.000
3. Bangunan Seluas 61 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA  
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 1980 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL  
SENDIRI Rp. 4.965.840.000
5. Bangunan Seluas 33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,  
HASIL SENDIRI Rp. 817.600.000
6. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,  
HASIL SENDIRI Rp. 537.640.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 541 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 870.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 180.000.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI  
Rp. 100.000.000



3. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
240.000.000

4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.763.808.478

D. SURAT BERHARGA Rp. 61.028.677.880

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.138.872.835

F. HARTA LAINNYA Rp. 5.085.454.975

Sub Total Rp. 129.782.625.168

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 129.782.625.168

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.